

**Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat**



Skripsi oleh :

ILHAM BUDI SANTOSO

01101003119

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ekonomi*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

S
657.661 07

14h
e
2014

C. - 143052

R: 27943/20525



**Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat**



Skripsi oleh :

ILHAM BUDI SANTOSO

01101003119

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ekonomi*

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Disusun Oleh:

Nama : Ilham Budi Santoso
NIM : 01101003119
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 September 2014
dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 12 September 2014

Ketua

Anggota

Anggota



Hj. Rochmawati Daud, S.E, M.Si, Ak Hasni Yusrianti, S.E., M.ACC, Ak, CA Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si, Ak

NIP. 196409031994032002

NIP. 197212152003122001

NIP. 197802102001122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA

NIP. 196508161995121001

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Budi Santoso
NIM : 01101003119
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat :

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, S.E, M.Si, Ak
Anggota : Hasni Yusrianti, S.E., M.ACC, Ak, CA
Tanggal Ujian : 12 September 2014

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 12 September 2014

METERAI
TEMPEL
PALEH MENRANGUN BANGSA
TOL

D7582ACF449008425

ENAM RIBU RUPIAH

6000



DJP

Pembuat Pernyataan

Ilham Budi Santoso

(01101003119)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ilham Budi Santoso

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 27 November 1992

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah (Orang Tua) : Jorong Sungai Klukup Pulau Mainan II Koto
Salak, Dharmasraya, Sumatera Barat

Alamat Email : ilhambudisantoso@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD N 16 Padang, Sumatera Barat

SMP : SMPN 12 Padang, Sumatera Barat

SMA : SMAN 10 Padang, Sumatera Barat

Pendidikan Nonformal : -

Pengalaman Organisasi : Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato
(PERMATO), tahun kepengurusan 2011/2012
dan 2012/2013.
Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FE
UNSRI, tahun kepengurusan 2012/2013, tahun
kepengurusan 2013/2014.

Penghargaan Prestasi : -

MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ya kalau tidak bisa Mati Syahid, Hidup Yang
Bermanfaat bagi umat sekitar aja.*

(Prinsip)

*matematika ketidakpastian tetapi
matematika tentang kesepakatan.*

(Sujiwo Tejo)

Ku Persembahkan Kepada :

- ✓ Bapak dan Ibunda tersayang
- ✓ Rimbun dan Ita tercinta
- ✓ Keluarga Besar Mbah Prapto
Karsono
- ✓ Sahabat-Sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai evaluasi atas sistem dan prosedur penerimaan daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ahmad Subeki, SE, MM, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Dra. Hj. Rochmawati Daud, SE, M.si, Ak. selaku Ketua Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

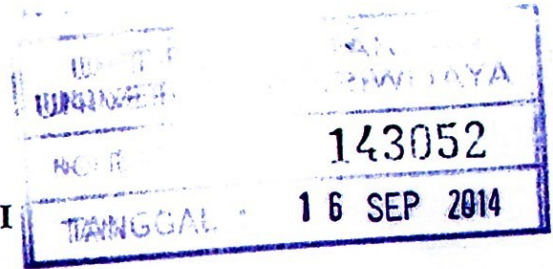
5. Hasni Yusrianti, SE, M.AAC, Ak. selaku Anggota Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat serta semangat selama penulisan skripsi ini dan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
6. Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan untuk skripsi ini.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orangtuaku tercinta yang luar biasa, Bapak Drs. Saikrasno, M.si dan Ibunda Sri Lestari, SE, terimakasih atas semua bimbingan, nasehat, doa yang tak henti-hentinya, semangat. dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang luar biasa selama ini.
9. Adek saya yang tercinta, Dewi Rimbun Krastari yang juga telah memberikan doa, dan dukungan selama ini.
10. Dani Fitrah Hayati yang sudah memberikan semangat dan doanya untuk cepat menyelesaikan pendidikan S1.
11. Sedulur Akuntansi angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. *Special thanks* Jimmy Nggalez yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengejar target bersama dan Bobby Ruk yang membuat skripsi semakin indah.
12. Sahabat-Sahabat ku di Padang Mauvil Suib, Fikri Mangku, Abdi Herdyan, Ichsan Noveliansyah, dan Yovi Oktavian, yang berjuang bersama demi kota Padang tercinta.

13. Kawan PERMATO angkatan 2010 dan Uda, Uni serta Dunsanak
Semuanya yang telah memberikan warna baru dalam hidup saya,
terimakasih atas semangat dan doa selama ini
14. Seluruh staf karyawan dan karyawan fakultas ekonomi universitas
sriwijaya, Kak Suryadi, SE yang telah berbaik hati melayani urusan-urusan
administrasi saya dengan baik dan sabar.
15. Seluruh abangan di Indralaya kak Angky Yolanda, bg Ranto Siboro, da
Jay, kak Ambon, mas Romy, mas Ben, dan abang-abang lainnya yang
tidak bisa saya sebut satu per satu.
16. Kakak-Kakak tingkat yang telah memberikan banyak pengalaman kepada
saya selama berkuliah di Universitas ini
17. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Sekali lagi
terimakasih ☺

Indralaya, Agustus 2014

Ilham Budi Santoso

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I II PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematikan Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN.....	13
2.1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	13
2.2. Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan	14
2.2.1. Kebijakan dalam penatausahaan.....	15
2.2.2. Kebijakan dalam anggaran	15
2.2.3. Kebijakan dalam akuntansi.....	16
2.3. Pihak-Pihak Terkait	17
2.4. Dokumen Yang Harus Diselenggarakan	17
2.5. Buku Catatan Yang Harus Diselenggarakan	18
2.6. Laporan Yang Harus Diselenggarakan.....	18
2.7. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007	19

2.8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2010.....	19
2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	19
2.10. Kriteria Penelitian	20
2.10.1 Berdasarkan Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan	20
2.10.2 Berdasarkan Pihak Terkait.....	22
2.10.3 Berdasarkan dokumen.....	23
2.10.4 Berdasarkan Buku Catatan	23
2.10.5 Berdasarkan Laporan.....	23
2.10.6 Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ...	24
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	30
3.3. Jenis Dan Sumber Data.....	30
3.4 Populasi Dan Sampel	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	31
3.6. Metode Analisis Data	32
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Deskriptif Objek Penelitian	34
4.2. Hasil Penelitian	34
4.2.1. Berdasarkan Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan.....	34
4.2.1.1. Berdasarkan Pelaksana Pendapatan Daerah-Bendahara Penerimaan.....	35
4.2.1.2 Berdasarkan Pelaksana Pendapatan Daerah-Bendahara Penerimaan Pembantu	37

4.2.1.3 Berdasarkan Pelaksana Pendapatan Daerah-Bank Kasda.....	40
4.2.2 Berdasarkan Pihak Terkait.....	43
4.2.3 Berdasarkan Dokumen.....	45
4.2.4 Berdasarkan Buku Catatan	46
4.2.5 Berdasarkan Pelaporan	48
4.2.6 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban	49
4.2.7 Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan .	50
4.3. Pembahasan	56
4.3.1 Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan	57
4.3.1.1 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	58
4.3.1.2 Sekretaris Daerah.....	58
4.3.1.3 Dinas Pendidikan.....	58
4.3.1.4 Dinas Kesehatan.....	59
4.3.1.5 Dinas Pekerjaan Umum.....	59
4.3.2 Pihak Pihak Terkait.....	60
4.3.3 Dokumen Yang Harus Diselenggarakan	60
4.3.4 Buku Catatan Yang Harus Diselenggarakan	61
4.3.5 Laporan Yang Harus Diselenggarakan.....	62
4.3.6 Sistem Pengendalian Internal	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
Daftar Pustaka	67
Lampiran-Lampiran	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai PDRB (Jutaan Rupiah)	7
Tabel 4.1	Tabel Hasil Penelitian	37
Tabel 4.2	Tabel Hasil Penelitian	40
Tabel 4.3	Tabel Hasil Penelitian	42
Tabel 4.4	Tabel Hasil Penelitian	44
Tabel 4.5	Tabel Hasil Penelitian	46
Tabel 4.6	Tabel Hasil Penelitian	48
Tabel 4.7	Tabel Hasil Penelitian	49
Tabel 4.8	Tabel Hasil Penelitian	50
Tabel 4.9	Tabel Hasil Penelitian	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1	Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007... ..	79
Lampiran 2.2	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 2 Tahun 2010	86
Lampiran 2.3	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2010	90
Lampiran 4.1	Kertas Kerja Penelitian	102
Lampiran 4.2	Lampiran Pembahasan	103

ABSTRAK

Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Oleh:

Ilham Budi Santoso

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas sistem dan prosedur penerimaan daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini adalah Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan, Pihak-Pihak Terkait, Dokumen Yang Harus Diselenggarakan, Buku Catatan Yang Harus Diselenggarakan, Laporan Yang Harus Diselenggarakan dan Sistem Pengendalian Internal sebagai variable.

Sampel penelitian ini terdiri dari lima SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdapat pada Kabupaten Dharmasraya yang diambil secara *purposive random sampling*. Faktor-faktor tersebut diuji dengan metode komparatif antara Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2010, ditambah dengan PP nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD terkait telah menjalankan sistem dan prosedur penerimaan sesuai dengan regulasi yang diamanahkan, namun untuk sistem pengendalian intern harus ditingkatkan mengingat masih ada yang harus dilakukan perbaikan diberbagai bidang.

Katakunci : *Kebijakan Sistem dan Prosedur Penerimaan, Pihak-Pihak Terkait, Dokumen, Buku Catatan, Laporan dan Sistem Pengendalian Internal.*

ABSTRACT

Evaluation Of Systems and Procedures for the Acceptance of the area of West Sumatra Province, District Dharmasraya.

From:

Ilham Budi Santoso

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak

The purpose of this research is at evaluating over the system and procedure local revenue district Dharmasraya Sumatera Province West. *The factors to be evaluating in this research is Policy the system and procedure of acceptance, related parties, a document that must be held, a logbook must be held, the report must be held and internal control system* variabel.

The samples consist of five SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) which is found in the county of dharmasraya taken as *purposive random sampling* The factors tested with a method of komapatif between Permendagri number 13 year 2006 dan Permendagri number 59 year 2007 with Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya number 2 year 2010 dan Peraturan Bupati Dharmasraya number 25 year 2010, coupled with a PP number 60 year 2008 regarding the internal control System.

Results of the study indicate that SKPD has been running system and related procedures of acceptance in accordance with mandated regulations, however for the system of internal control should be improved considering there are still improvements to be made in various fields.

Key words: Policy the system and procedure of acceptance, related parties, document, logbook, the report and internal control system

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Dewasa ini keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Uniknya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini merupakan topik hangat yang sering muncul ke permukaan, bahkan berpotensi menjadi perpecahan bangsa. Persoalannya mudah ditebak, yaitu adanya daerah yang kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat. Munculnya berbagai gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi akhir-akhir ini sedikit banyak juga disebabkan oleh masalah keuangan. Daerah-daerah yang merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah menginginkan jatah yang lebih besar sesuai dengan porsi yang disumbangkan daerahnya. Berkembanglah isu bahwa pemerintah pusat hanya mementingkan dirinya sendiri atau lebih berpihak kepada daerah tertentu.

Masalah hubungan keuangan pusat dan daerah timbul karena adanya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh badan-badan yang disusun secara bertingkat (*multiplicity of government units*). Hal ini didorong oleh kebutuhan ketatanegaraan dan administrasi negara karena tugas-tugas pemerintahan yang makin banyak dan menjangkau daerah yang luas tidak mungkin diselesaikan

menjadi bahan pembicaraan yang tidak habis-habisnya terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini menjadi lebih intens lagi setelah kedua undang-undang tersebut diatas direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004.

Hubungan keuangan vertikal pusat-daerah justru semakin timpang. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin mengandalkan dana dari pusat. Porsi pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengecil. Tak heran kalau sebagian besar APBD di kebanyakan provinsi dan kabupaten/kota habis untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran wajib yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pusat.

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah, namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus disiapkan antara lain, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah.

Aspek keuangan adalah salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat

dengan baik apabila dipusatkan ditangan satu tingkat pemerintahan saja. Dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah akan ada pendekatan indiplisiner karena banyak disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan hubungan ini, misalnya ketatanegaraan, administrasi negara, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Masalah perimbangan keuangan ini merupakan salah satu tuntutan reformasi, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Fakta dan data selama ini menunjukan bahwa hampir semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh transfer pemerintah pusat dan transfer lain-lain, yang diatur oleh peraturan perundangundangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan lain yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat (A Yani,2002).

Aturan keuangan pusat-daerah, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, disisi lain untuk memfasilitasi pembangunan nasional, disisi lain untuk pembangunan daerah, yang dijalankan dibawah skema otonomi daerah. Hal ini

menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Faktor lain ketidakmampuan daerah menggali sumber-sumber keuangan adalah karena banyaknya regulasi yang mengatur sistem dan prosedur keuangan pemerintahan daerah, regulasi yang mengatur aspek pengelolaan keuangan antara lain:

- a. PP No. 24/2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. PP No. 21/2004 mengenai Penyusunan RKA-KL
- c. PP No. 58/2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. PP No. 65/2005 mengenai Pedoman Penyusunan & Penerapan SPM
- e. PP No. 8/2006 mengenai Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah
- f. PP No. 40/2006 mengenai Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan
- g. PP No 39/2007 mengenai Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- h. PP No 71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
- i. Perpres 7/2005 RPJM 2004 - 2009

- j. RPJP Daerah dan RPJM Daerah
- k. PMDN 59/2007 Perubahan atas PMDN 13/2006 ttg PKD
- l. PMDN 30/2007 Pedoman Penyus. APBD TA 2008
- m. SE Mendagri No. 050/2020/SJ/2005 Petunjuk Penyusunan Dokumen
- n. PMDN 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. PP No 6/2008 mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda
- p. PP No 8/2008 mengenai Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- q. PP No. 56/2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dengan banyaknya regulasi yang diterima daerah sehingga memunculkan ketidaksiapan daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan mengkoordinasikan seluruh regulasi. Ketidaksiapan ini meliputi, sumber daya manusia, teknologi, regulasi daerah itu sendiri. Pengelolaan anggaran yang buruk berdampak luas pada pembangunan daerah termasuk tingginya angka kemiskinan dan buruknya sumber daya manusia Indonesia. Buruknya pengelolaan keuangan daerah disebabkan kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Terdapat tiga faktor yang melatar belakangi kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (Salahudin, 2014):

- a. minimnya pemahaman pemerintah daerah (SDM) tentang pengelolaan keuangan daerah,
- b. sistem penganggaran yang rigid (rumit), dan
- c. pengaruh politik dalam pengelolaan anggaran.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyelenggarakan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Permendagri nomor 59 tahun 2007, dan Peraturan Daerah yang berlaku. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses yang harus dilakukan dalam merencanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Prosedur yang dimaksud adalah:

- a. Prosedur Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Prosedur Penerimaan Daerah
- c. Prosedur Pelaksanaan Anggaran Daerah
- d. Prosedur Pengeluaran Daerah

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diukur dengan pencapaian output, pelayanan, report yang dikehendaki sistem, dan pihak terkait yang berhubungan. Sehingga dapat menimbulkan ketidaksiapan pihak-pihak yang terkait dalam sistem yang rigid ini.

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Sebagai Kabupaten yang baru, perekonomian di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2012 selalu menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000 yang terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 tercatat sebesar 1,513 triliun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 maka pada tahun 2006 tercatat sebesar 899,308 miliar rupiah. Berikut adalah nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2006 sampai tahun 2012.

Tabel.1.1 Nilai PDRB (Jutaan Rupiah)

Tahun	Nilai PDRB	Nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000
2005	1.290.369,56	846.237,71
2006	1.513.323,36	899.308,50
2007	1.787.383,45	957.502,47
2008	2.109.946,67	1.020.079,52
2009	2.346.484,20	1.087.775,99
2010	2.677.790,01	1.158.557,51
2011	3.067.927,06	1.234.376,14
2012	3.448.616,12	1.316.135,71

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya

Dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, sebagai contoh sampai dengan tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya selalu menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Pada tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% dimana pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,46%.

PDRB atau PRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. PDRB Per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB Regional Perkapita menunjukkan perkiraan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah yang merupakan PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Kondisi PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita untuk Tahun 2006 di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, sebagai contoh dimana pada tahun 2006 tercatat kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 13,75 persen dengan nilai 8,9 juta rupiah per orang pertahun, terlihat lebih tinggi dari perkapita tahun 2005 yakni hanya 7,8 juta perorang pertahun.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam skala besar maupun skala rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita di Kabupaten Dharmasraya. Meningkatkan daya saing usaha dengan berkembangnya

usaha-usaha produktif di setiap sektor ekonomi yang didukung oleh keberadaan sarana dan parasarana penunjang juga salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya mendapatkan predikat Kabupaten Pemekaran Terunggul di Indonesia. Penetapan prestasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120-277 tahun 2011. Kabupaten Dharmasraya berhasil mengumpulkan nilai 59,43 persen, yang berasal dari empat indikator, masing-masing peningkatan kesejahteraan masyarakat, good governance, ketersediaan pelayanan publik dan peningkatan daya saing. Nilai kemenangan Kabupaten Dharmasraya itu dapat dilihat dari tercapainya beberapa indikator penilaian. Misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dharmasraya meraih nilai 20,59 persen dari 30 persen yang ditetapkan, sementara untuk good governance diraih nilai 19,28 persen dari 25 persen yang diisyaratkan. Sementara dari sisi penurunan angka kemiskinan, juga terjadi penurunan yang drastis sebesar 56 persen, dari 10.608 KK turun menjadi 5.590 KK.

Sedangkan dari sisi peningkatan daya saing, juga mengalami peningkatan. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya lembaga perbankan, dengan total aset perbankan secara keseluruhan kurang lebih Rp2 triliun. Jika tahun 2005 realisasi investasi sebanyak 72 unit, maka tahun 2009 menjadi 219 unit.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melihat apakah regulasi nasional dan regulasi daerah sesuai atau tidak di sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur yang ingin diteliti adalah pada bagian prosedur penerimaan. karena penerimaan

adalah bagian yang sensitif dalam SKPD. Sehingga saya tertarik menulis skripsi dengan judul *“Evaluasi Atas Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah apakah telah menerapkan, mematuhi, serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan daerah di kabupaten Dharmasraya yang sesuai dengan regulasi yang ada.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi:

- a. Prosedur penerimaan melalui bendahara penerimaan,
- b. Prosedur penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu, dan
- c. Prosedur penerimaan melalui bank yang ditunjuk pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan informasi bagi daerah Kabupaten Dharmasraya dan dapat bermanfaat dengan memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait selanjutnya.

b. Manfaat Praktis.

Sebagai salah satu prasyarat akademis untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk 5 bab, dimana tiap-tiap pada bab disusun secara sistematis sehingga memberikan penjelasan bahwa satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini dilakukan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, manfaat yang diperoleh setelah penelitian ini dilakukan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kerangka berfikir serta hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai definisi dari setiap variabel serta alat ukur dari variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data dan metode analisis data dari penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data terhadap data yang telah diperoleh atas penelitian, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, yang mana berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini, serta juga memberikan saran-saran yang mungkin dapat memberikan manfaat untuk pihak yang memiliki kepentingan terhadap skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta Rajawali Pers
- Anita Wulandari 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol 5 no 2 November.
- BPS Kabupaten Dharmasraya
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Salemba empat
- K.H. Abdurrahman Wahid, Eko Satio Budi. 2006. *Ekonomi Berbasis Sektoral*. Iskandariyah Institute.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2010
- Pereaturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang *Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Permendagri nomor : 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri nomor : 59 tahun 2007 tentang *Perubahn atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tenatang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 2 tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor : 25 tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Dharmasraya

Uma sekaran 2007, *Research Methods for Business (Metode Penelitian untuk*

*Bisnis)*edisi 4, Jakarta Salemba empat.

UU RI 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004*

tentang Pemerintah Daerah

UU RI 2004. *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan*

Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Widodo 2001, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka*

menghadapi otonomi daerah,

_____ www.bpkp.go.id

_____ www.wikipedia.com